



KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

JALAN JENDERAL SUDIRMAN KAV. 69, JAKARTA 12190, TELEPON (021) 7398381 - 7398382, FAKSIMILE (021) 7398323
SITUS <http://www.menpan.go.id>

Nomor : B/ 58 /PW.04/2020
Hal : Hasil Evaluasi Pelaksanaan
Pembangunan Zona Integritas
Menuju WBK dan WBBM di Lingkungan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Tahun 2020

30 Desember 2020

Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

di

Jakarta

Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah, kami telah melakukan evaluasi atas pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang diusulkan sebagai unit kerja percontohan.

Tujuan dari evaluasi dimaksud adalah untuk menilai dan memberikan saran perbaikan dalam pelaksanaan pembangunan Zona Integritas, agar dapat mewujudkan unit kerja di Kemendikbud yang **bersih dan bebas dari praktik KKN, serta mampu memberikan pelayanan yang berkualitas** kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Secara umum hasil evaluasi dapat kami sampaikan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di tahun 2020 mengalami perkembangan yang ditandai dengan jumlah usulan yang meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan peningkatan integritas dan kualitas layanan pada unit kerja di lingkungan Kemendikbud;
2. Ringkasan hasil evaluasi atas usulan unit kerja yang disampaikan oleh Kemendikbud adalah sebagai berikut:

No.	Tahapan Evaluasi	Jumlah Unit Kerja	Keterangan
1.	Unit kerja yang diusulkan	65	57 unit kerja menuju WBK 8 unit kerja menuju WBBM
2.	Memenuhi seleksi awal administrasi	61	Bobot nilai per area minimal 60% pada semua area pengungkit untuk predikat menuju WBK, dan 75% untuk predikat menuju WBBM.
3.	Memenuhi kriteria survei eksternal	51	IPP > 3,2; IPAK > 3,6 (WBK) IPP > 3,6; !PAK > 3,6 (WBBM)
4.	Unit kerja yang memenuhi kriteria WBK/WBBM	17	Berdasarkan hasil wawancara via telekonferensi, pendalaman, inovasi, testimoni pengguna layanan, kunjungan langsung dan data pembandingan lainnya.

Uraian singkat hasil evaluasi setiap unit kerja terdapat pada lampiran surat ini.

Beberapa catatan atas hasil evaluasi ini antara lain adalah:

1. Sebagian unit kerja yang diusulkan belum memahami definisi maupun target kinerja yang telah dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Hal ini menyebabkan unit kerja yang bersangkutan belum sepenuhnya membangun strategi yang tepat untuk mencapai kinerja yang lebih baik;
2. Komitmen yang telah dibangun dalam mendukung perbaikan birokrasi belum sepenuhnya didukung dengan pemahaman yang memadai, baik oleh pimpinan maupun anggota tentang bagaimana membangun birokrasi yang lebih baik;
3. Pimpinan unit kerja belum sepenuhnya menginternalisasi dan membagi visi (*sharing vision*) atas perubahan yang harus dilakukan pada unit kerja. Hal tersebut berdampak pada semangat perubahan pada pejabat/pegawai di unit kerja yang diusulkan masih perlu ditingkatkan mengenai pelaksanaan pembangunan Zona Integritas;
4. Sebagian besar unit kerja telah berupaya memperbaiki proses bisnisnya dengan membangun berbagai inovasi. Namun inovasi tersebut tidak selalu relevan mampu mendorong peningkatan pencapaian target kinerja yang lebih baik dan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh pengguna layanan;
5. Sebagian unit kerja yang diusulkan belum sepenuhnya menerapkan manajemen risiko dengan baik, sehingga belum dapat mengenali serta memahami berbagai potensi yang akan mempengaruhi risiko kegagalan pencapaian kinerja;
6. Tim Penilai Internal yang memiliki peran untuk mendorong dan mengawal pembangunan Zona Integritas belum melakukan tugasnya dengan baik, sehingga masih ada unit kerja yang belum berhasil memenuhi syarat dalam pengajuan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM;
7. Sebagian unit kerja telah berupaya membangun kedekatan (*intimacy*) dengan pengguna layanan, namun pada sebagian unit kerja belum memberikan hasil yang optimal sehingga upaya perbaikan tersebut belum mendapat tanggapan positif. Hal ini tercermin dari hasil survei eksternal pada 10 (sepuluh) unit kerja yang tidak memenuhi batas minimal.

Saran perbaikan yang dapat kami sampaikan atas catatan di atas adalah:

1. Mereviu kembali definisi kinerja dan target yang telah ditetapkan dan memastikan seluruh unit kerja tersebut memahaminya, serta pimpinan dan seluruh pegawai mampu merumuskan strategi pencapaiannya;
2. Meningkatkan pemahaman dan komitmen, baik bagi para pimpinan maupun seluruh pegawai pada unit kerja, terkait pentingnya pembangunan Zona Integritas dalam rangka mendorong percepatan reformasi birokrasi;
3. Terus meningkatkan internalisasi Zona Integritas menuju WBK/WBBM secara berkala ke seluruh pegawai dan mendorong pelaksanaan dialog kinerja antara pimpinan unit kerja dengan seluruh pegawai di seluruh tingkatan organisasi;
4. Mendorong seluruh unit kerja agar terus berinovasi yang berfokus pada peningkatan kinerja dan kebutuhan pengguna layanan;
5. Meningkatkan penerapan manajemen risiko untuk menghindari kemungkinan terjadinya penyimpangan yang dapat mempengaruhi integritas;
6. Meningkatkan kapasitas Inspektorat sebagai Tim Penilai Internal dalam mendorong dan mengawal pembangunan Zona Integritas di seluruh unit kerja agar pelaksanaannya lebih efektif;
7. Meningkatkan kedekatan dengan pengguna layanan dengan menjelaskan berbagai upaya perbaikan yang telah dilakukan dalam meningkatkan kualitas layanan dan integritas organisasi.

Demikian laporan hasil evaluasi atas pelaksanaan pembangunan Zona Integritas di lingkungan Kemendikbud. Selanjutnya, kami harapkan agar Saudara dapat mendorong pelaksanaan pembangunan Zona Integritas secara berkelanjutan.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

PIH, Deputy, Bidang Reformasi Birokrasi,
Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan



Jufri Rahman

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;
4. Ketua Ombudsman Republik Indonesia.

Lampiran I

Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020

Nomor: B/ 58 /PW.04/2020

30 Desember 2020

**REKAPITULASI HASIL EVALUASI ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK/WBBM
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2020**

A. Memenuhi seluruh kriteria Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

NO	UNIT KERJA	TOTAL NILAI	IPP	IPAK	REKOMENDASI
1	LPMP Jawa Tengah	87,45	3,90	3,96	Terus melakukan pengembangan inovasi untuk meningkatkan perbaikan kinerja dan mewujudkan pelayanan prima yang berkelanjutan.
					Melakukan pemantauan secara berkala agar tidak terjadi penurunan kualitas pelayanan serta menjaga dari terjadinya berbagai penyimpangan.
					Mendorong agar unit kerja menjadi percontohan pelayanan bagi unit kerja Kemendikbud lainnya, sehingga upaya-upaya perbaikan birokrasi terus menyebar dan berkembang.
2	PPPPTK Bidang Otomotif dan Elektronika	86,18	3,74	3,85	Menciptakan inovasi yang semakin berkualitas dalam hal penguatan integritas maupun pelayanan setelah ditetapkan menjadi unit kerja WBBM.
					Melakukan pemantauan secara berkala agar tidak terjadi penurunan kualitas pelayanan serta menjaga dari terjadinya berbagai penyimpangan.
					Mendorong agar unit kerja menjadi percontohan pelayanan bagi unit kerja Kemendikbud lainnya, sehingga upaya-upaya perbaikan birokrasi terus menyebar dan berkembang.

B. Memenuhi seluruh kriteria Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)

NO	UNIT KERJA	TOTAL NILAI	IPP	IPAK	REKOMENDASI
1	Balai Pelestarian Nilai Budaya Bali	78,55	3,57	3,64	Meningkatkan monitoring terhadap inovasi serta meningkatkan kualitasnya agar terasa lebih berdampak terhadap <i>stakeholders</i> .
					Meningkatkan sistem pengawasan internal yang efektif melalui inovasi pengawasan serta penguatan manajemen risiko dan integritas pegawai.
2	LPMP Jawa Barat	78,92	3,86	3,89	Meningkatkan kualitas inovasi dalam hal penguatan integritas dan pelayanan untuk mewujudkan WBBM.
					Pimpinan unit kerja melakukan pengawasan secara berkala untuk memastikan bahwa seluruh sistem yang telah dibangun masih berjalan dengan baik dan terus dikembangkan.
3	LPMP Daerah Istimewa Yogyakarta	78,93	3,84	3,92	Meningkatkan peran agen perubahan sebagai ujung tombak perubahan di organisasi agar dapat dirasakan dampaknya melalui penerapan nilai-nilai organisasi.
					Mengembangkan inovasi dalam bentuk digital yang terintegrasi dan dirasakan manfaatnya oleh <i>stakeholders</i> .
4	LPMP Nusa Tenggara Barat	78,83	3,75	3,79	Meningkatkan kualitas inovasi, baik yang sudah ada maupun inovasi baru, agar memberikan dampak bagi kinerja dan kemudahan dalam pemberian layanan.
					Melakukan identifikasi risiko integritas lebih mendalam dan menggunakan hasil identifikasi tersebut sebagai dasar pengembangan inovasi sehingga terwujud sistem pengawasan integritas yang lebih baik.
5	Museum Basoeki Abdullah	78,42	3,75	3,89	Meningkatkan kualitas inovasi dengan membangun kerja sama yang lebih erat dengan komunitas seni.
					Meningkatkan kerja sama dengan industri kreatif untuk mempromosikan sosok Basoeki Abdullah.
6	Museum Benteng Vredeborg Yogyakarta	79,61	3,94	3,96	Meningkatkan kualitas inovasi dengan membangun kerja sama yang lebih erat dengan komunitas seni dan sejarah.
					Meningkatkan kerja sama dengan industri kreatif untuk mempromosikan sejarah Benteng Vredeborg.

7	Politeknik Negeri Bandung	78,25	3,62	3,78	Meningkatkan monitoring terhadap inovasi serta meningkatkan kualitasnya agar terasa lebih berdampak terhadap <i>stakeholders</i> .
					Mendorong agen perubahan agar terus berinovasi dan membawa dampak terhadap peningkatan kinerja dan pemberian layanan.
8	PPPPTK Bidang Bangunan dan Listrik	77,78	3,84	3,92	Mendorong agen perubahan agar terus berinovasi dan membawa dampak terhadap peningkatan kinerja dan pemberian layanan.
					Mengembangkan inovasi dalam bentuk digital yang terintegrasi dan dirasakan manfaatnya oleh <i>stakeholders</i> .
9	PPPPTK Bisnis dan Pariwisata	77,74	3,86	3,93	Mendorong agen perubahan agar terus berinovasi dan membawa dampak terhadap peningkatan kinerja dan pemberian layanan.
					Mengembangkan inovasi dalam bentuk digital yang terintegrasi dan dirasakan manfaatnya oleh <i>stakeholders</i> .
10	PPPPTK Ilmu Pengetahuan Alam	79,17	3,86	3,94	Meningkatkan peran agen perubahan sebagai ujung tombak perubahan di organisasi agar dapat dirasakan dampaknya melalui penerapan nilai-nilai organisasi.
					Mengembangkan inovasi dalam bentuk digital yang terintegrasi dan dirasakan manfaatnya oleh <i>stakeholders</i> .
11	PPPPTK Matematika	79,85	3,97	4,00	Meningkatkan peran agen perubahan sebagai ujung tombak perubahan di organisasi agar dapat dirasakan dampaknya melalui penerapan nilai-nilai organisasi.
					Mengembangkan inovasi dalam bentuk digital yang terintegrasi dan dirasakan manfaatnya oleh <i>stakeholders</i> .
12	PPPPTK Pertanian	78,48	3,77	3,88	Meningkatkan komitmen dalam pembangunan ZI agar terwujud perubahan birokrasi yang bersih dan melayani.
					Terus melakukan inovasi, baik untuk peningkatan tata kelola internal maupun untuk memberikan pelayanan yang lebih berkualitas.
13	PPPPTK Seni dan Budaya	79,24	3,79	3,88	Melakukan identifikasi risiko integritas lebih mendalam dan menggunakan hasil identifikasi tersebut sebagai dasar pengembangan inovasi sehingga terwujud sistem pengawasan integritas yang lebih baik.
					Melakukan kerja sama dengan industri kreatif untuk mendorong pengembangan seni dan budaya.

14	Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra	78,44	3,72	3,86	Meningkatkan publikasi produk-produk hasil unit kerja sehingga tujuan pembinaan bahasa yang diharapkan terus terlaksana.
					Terus melakukan inovasi, baik untuk peningkatan tata kelola internal maupun untuk memberikan pelayanan yang lebih berkualitas.
15	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	78,08	3,71	3,84	Mendorong agen perubahan agar terus berinovasi dan membawa dampak terhadap peningkatan kinerja dan pemberian layanan.
					Mengembangkan inovasi dalam bentuk digital yang terintegrasi dan dirasakan manfaatnya oleh <i>stakeholders</i> .

C. Memenuhi batas survei, tetapi tidak memenuhi seluruh kriteria WBBM

NO	UNIT KERJA	TOTAL NILAI	IPP	IPAK	REKOMENDASI
1	BP-PAUD dan Dikmas Jawa Timur	81,67	3,77	3,89	Mengembangkan pola internalisasi ZI yang efektif kepada seluruh pegawai untuk menguatkan pembangunan ZI dan memantau perkembangannya.
					Meningkatkan keterlibatan pimpinan secara aktif dalam melakukan monitoring dan evaluasi pembangunan ZI.
2	LPMP Riau	79,60	3,81	3,92	Mengembangkan inovasi baru sesuai dengan kebutuhan unit kerja dan pengguna layanan dan memastikan inovasi tersebut berdampak pada peningkatan kinerja maupun kualitas pelayanan.
					Menjaga dan meningkatkan komitmen pegawai dengan <i>stakeholders</i> guna meningkatkan pelayanan publik yang bersih dan melayani.
3	PPPPTK Bidang Pendidikan Jasmani dan Bimbingan Konseling	78,89	3,74	3,81	Membangun inovasi yang telah dirancang serta melakukan monitoring untuk mengukur dampak/manfaat dari inovasi tersebut terhadap kinerja organisasi.
					Melakukan pemetaan risiko dan menyusun mitigasinya, sehingga terwujud pengendalian integritas yang lebih baik.
					Memanfaatkan media publikasi untuk menyampaikan informasi terkait pembangunan ZI sehingga masyarakat ikut terlibat dalam memantau dan mengawasi.

4	PPPPTK Bidang Mesin dan Teknik Industri	83,26	3,91	3,89	Melakukan pemetaan risiko dan menyusun mitigasinya, sehingga terwujud pengendalian integritas yang lebih baik.
					Memanfaatkan media publikasi untuk menyampaikan informasi terkait pembangunan ZI sehingga masyarakat ikut terlibat dalam memantau dan mengawasi.

D. Memenuhi batas survei, tetapi tidak memenuhi seluruh kriteria WBK

NO	UNIT KERJA	TOTAL NILAI	IPP	IPAK	REKOMENDASI
1	Balai Arkeologi Daerah Istimewa Yogyakarta	66,39	3,60	3,85	Mendorong implementasi pembangunan ZI sehingga mewujudkan budaya integritas dan kinerja tinggi di unit kerja.
					Mendorong penguatan komitmen dan pemahaman pimpinan dan pegawai terhadap substansi pembangunan ZI guna melakukan perubahan secara nyata di unit kerja.
					Meningkatkan keterlibatan pimpinan secara aktif dalam melakukan monitoring dan evaluasi pembangunan ZI.
2	Balai Bahasa Bali	65,25	3,75	3,91	Mendorong implementasi pembangunan ZI sehingga mewujudkan budaya integritas dan kinerja tinggi di unit kerja.
					Mendorong penguatan komitmen dan pemahaman pimpinan dan pegawai terhadap substansi pembangunan ZI guna melakukan perubahan secara nyata di unit kerja.
					Meningkatkan keterlibatan pimpinan secara aktif dalam melakukan monitoring dan evaluasi pembangunan ZI.
3	Balai Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta	74,35	3,63	3,77	Meningkatkan komitmen pembangunan ZI pada setiap individu sehingga tercipta budaya pelayanan publik yang prima.
					Membangun inovasi pelayanan yang bersifat mendekatkan, mempermudah, dan mempercepat waktu layanan kepada masyarakat.

4	Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan	65,54	3,58	3,71	Membangun ZI secara maksimal melalui pemenuhan enam area perubahan terutama dalam penegakan integritas dan inovasi pelayanan.
					Mendorong penguatan komitmen dan pemahaman pimpinan dan pegawai terhadap substansi pembangunan ZI guna melakukan perubahan secara nyata di unit kerja.
					Membangun inovasi pelayanan yang bersifat lebih mendekati dengan <i>stakeholders</i> utama melalui berbagai kegiatan/media serta menyempurnakan SOP, sarana, dan kecepatan pelayanan.
5	BP-PAUD dan Dikmas Nusa Tenggara Barat	73,58	3,95	3,98	Memastikan bahwa perbaikan pelayanan dan penguatan integritas telah diimplementasikan secara konsisten oleh setiap pegawai.
					Membangun inovasi pelayanan yang bersifat mendekati, mempermudah, dan mempercepat waktu layanan kepada masyarakat sesuai dengan <i>core business</i> unit kerja.
					Membangun inovasi yang memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi terkait pelayanan sehingga tercipta persepsi positif.
					Mengoptimalkan sarana dan prasarana, peran pegawai, serta atribut tertentu untuk memberikan <i>image branding</i> yang kuat dalam pembangunan ZI.
6	BP-PAUD dan Dikmas Sulawesi Selatan	70,56	3,79	3,85	Membangun inovasi yang mampu mengatasi permasalahan isu strategis dan meningkatkan kinerja organisasi.
					Membangun inovasi pelayanan yang bersifat mendekati, mempermudah, dan mempercepat waktu layanan kepada masyarakat sesuai dengan <i>core business</i> unit kerja.
					Mengoptimalkan sarana dan prasarana, peran pegawai, serta atribut tertentu untuk memberikan <i>image branding</i> yang kuat dalam pembangunan ZI.

7	BP-PAUD dan Dikmas Kalimantan Selatan	66,33	3,49	3,64	Memastikan bahwa perbaikan pelayanan dan penguatan integritas telah diimplementasikan secara konsisten oleh setiap pegawai.
					Membangun inovasi pelayanan yang bersifat mendekatkan, mempermudah, dan mempercepat waktu layanan kepada masyarakat sesuai dengan <i>core business</i> unit kerja.
8	BP-PAUD dan Dikmas Sumatera Utara	71,38	3,83	3,84	Menjadikan kinerja sebagai dasar dalam pembangunan ZI, penyusunan peta proses bisnis dan SOP, serta inovasi layanan.
					Membangun ZI dengan maksimal melalui pemenuhan enam area perubahan terutama dalam penegakan integritas dan inovasi pelayanan.
9	Direktorat Sekolah Menengah Atas	71,48	3,87	3,95	Membangun inovasi yang mampu mengatasi permasalahan isu strategis dan meningkatkan kinerja organisasi.
					Melakukan monitoring terhadap inovasi yang telah dibangun untuk mengukur dampaknya bagi <i>stakeholders</i> .
					Membangun program layanan yang mampu mendekatkan organisasi dengan <i>stakeholders</i> .
10	LPMP Banten	71,08	3,86	3,93	Meningkatkan pemahaman pegawai terkait pembangunan ZI melalui <i>sharing knowledge</i> serta melakukan evaluasi untuk mewujudkan perubahan secara nyata pada unit kerja.
					Mengembangkan inovasi tata kelola internal dan pelayanan guna memberikan pelayanan yang berkualitas.
					Membangun sistem pengawasan internal yang efektif melalui inovasi pengawasan dan penguatan integritas pegawai.
11	LPMP Gorontalo	67,81	3,79	3,89	Meningkatkan pemahaman pegawai terkait pembangunan ZI melalui <i>sharing knowledge</i> serta melakukan evaluasi untuk mewujudkan perubahan secara nyata pada unit kerja.
					Mengembangkan inovasi tata kelola internal dan pelayanan guna memberikan pelayanan yang berkualitas.
					Membangun sistem pengawasan internal yang efektif melalui inovasi pengawasan dan penguatan integritas pegawai.

12	LPMP Maluku	73,01	3,85	3,93	Membangun inovasi yang memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi terkait pelayanan sehingga tercipta persepsi positif.
					Menyusun rencana keberlanjutan atas inovasi yang telah dibangun dan mengidentifikasi kendala yang dihadapi sebagai media monitoring.
					Mengoptimalkan sarana dan prasarana, peran pegawai, serta atribut tertentu untuk memberikan <i>image branding</i> yang kuat dalam pembangunan ZI.
13	LPMP Sulawesi Utara	74,41	3,91	3,96	Melakukan pemetaan risiko sesuai dengan kondisi daerah unit kerja, sehingga dapat disusun mitigasi risiko yang lebih tepat.
					Meningkatkan komitmen pembangunan ZI dan internalisasinya pada seluruh pegawai, sehingga dapat menciptakan budaya pelayanan publik yang prima.
					Memperbaiki strategi komunikasi melalui pengelolaan media untuk meningkatkan kedekatan organisasi dengan masyarakat.
14	LPMP Sumatera Barat	72,99	3,84	3,85	Meningkatkan pelaksanaan survei kepuasan masyarakat secara berkala dan melakukan monitoring atas tindak lanjut rekomendasi hasil survei pelayanan.
					Membangun inovasi pelayanan yang lebih mengarah kepada kemudahan dalam memberikan layanan dan mudah diakses oleh masyarakat.
					Melakukan pemetaan risiko sesuai dengan kondisi daerah unit kerja, sehingga dapat disusun mitigasi risiko yang lebih tepat.
15	Politeknik Negeri Bali	73,37	3,87	3,91	Membangun inovasi pelayanan yang lebih mengarah kepada kemudahan dalam memberikan layanan dan mudah diakses oleh masyarakat.
					Meningkatkan kualitas pengawasan internal dengan memanfaatkan sistem pengawasan, inovasi pengawasan, dan penguatan integritas pegawai.
					Meningkatkan pelaksanaan survei kepuasan masyarakat secara berkala dan melakukan monitoring atas tindak lanjut rekomendasi hasil survei pelayanan.

16	PPPPTK Bahasa	73,16	3,82	3,88	Mendorong peningkatan kualitas para pendidik dan tenaga pendidik (guru bahasa) yang diikutsertakan dalam diklat agar memberikan dampak yang lebih besar kepada masyarakat luas (khususnya pelajar).
					Melakukan pemetaan sebaran para pendidik dan tenaga pendidik untuk mengetahui rasio ketimpangan antara para pengajar bidang dan para siswa.
17	PPPPTK Pendidikan Kewarganegaraan dan Ilmu Pengetahuan Sosial	70,64	3,82	3,73	Mendorong agen perubahan agar terus berinovasi dan membawa dampak terhadap peningkatan kinerja dan pemberian layanan.
					Memaksimalkan dialog kinerja antara atasan dengan bawahan guna memastikan tercapainya target kinerja.
					Penguatan integritas aparatur dengan memetakan/mengidentifikasi potensi penyimpangan yang mungkin terjadi dan memitigasinya.
18	PPPPTK Taman Kanak-Kanak dan Pendidikan Luar Biasa	72,2	3,74	3,85	Memperkuat pembangunan ZI dengan penguatan tata kelola internal unit kerja.
					Membangun inovasi pelayanan yang lebih mengarah kepada kemudahan dalam memberikan layanan dan mudah diakses oleh masyarakat.
					Membangun sistem pengawasan internal yang efektif melalui inovasi pengawasan dan penguatan integritas pegawai.
19	Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi	66,91	3,65	3,70	Memprioritaskan pembangunan ZI pada unit kerja layanan utama yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
					Membangun lingkungan pengendalian di seluruh unit kerja, sehingga pengawasan internal di Ditjen Dikti lebih efektif.
					Membangun inovasi yang sesuai dengan <i>core business</i> Setditjen Dikti untuk mendukung kinerja unit eselon I.

20	Universitas Airlangga (Fakultas Psikologi)	73,09	3,63	3,75	Memperbaiki strategi komunikasi melalui pengelolaan media untuk meningkatkan kedekatan organisasi dengan masyarakat.
					Melakukan penguatan manajemen risiko dan integritas pegawai agar terbangun sistem pengawasan internal yang efektif.
					Membangun inovasi pelayanan berdasarkan permasalahan yang ada sehingga sesuai dengan kebutuhan <i>stakeholders</i> (mahasiswa).
21	Universitas Andalas (Fakultas Teknik)	71,85	3,68	3,87	Memperbaiki strategi komunikasi melalui pengelolaan media untuk meningkatkan kedekatan organisasi dengan masyarakat.
					Melakukan penguatan manajemen risiko dan integritas pegawai agar terbangun sistem pengawasan internal yang efektif.
					Membangun inovasi pelayanan berdasarkan permasalahan yang ada sehingga sesuai dengan kebutuhan <i>stakeholders</i> (mahasiswa).
22	Universitas Brawijaya (Fakultas Teknologi Pertanian)	73,96	3,77	3,85	Melakukan evaluasi atas pembangunan ZI secara berkala.
					Meningkatkan keterlibatan pegawai dalam peningkatan integritas dan tata kelola internal.
					Melakukan penguatan manajemen risiko dan integritas pegawai agar terbangun sistem pengawasan internal yang efektif.
23	Universitas Diponegoro (Fakultas Teknologi)	72,21	3,86	3,91	Membangun sistem pengawasan internal yang efektif melalui inovasi pengawasan dan penguatan integritas pegawai.
					Melakukan identifikasi risiko integritas dengan memperhatikan potensi terjadinya penyimpangan serta meningkatkan keterlibatan pimpinan dalam monitoring pelaksanaan sistem pengawasan.
					Melakukan <i>sharing vision</i> berkelanjutan kepada seluruh anggota organisasi melalui dialog kinerja, <i>in-house training</i> , dan FGD.
24	Universitas Hasanuddin (Fakultas Ilmu Budaya)	73,20	3,86	3,93	Melakukan evaluasi atas pembangunan ZI secara berkala.
					Meningkatkan keterlibatan pegawai dalam peningkatan integritas dan tata kelola internal.
					Melakukan penguatan manajemen risiko dan integritas pegawai agar terbangun sistem pengawasan internal yang efektif.

25	Universitas Indonesia (Fakultas Kesehatan Masyarakat)	71,19	3,72	3,86	Mengembangkan inovasi yang mendukung pencapaian kinerja dan peningkatan kualitas layanan.
					Meningkatkan kemudahan pemberian layanan kepada <i>stakeholders</i> terutama dengan pembelajaran jarak jauh.
					Melakukan identifikasi risiko integritas dengan memperhatikan potensi terjadinya penyimpangan serta meningkatkan keterlibatan pimpinan dalam monitoring pelaksanaan sistem pengawasan.
26	Universitas Lambung Mangkurat (Fakultas Teknik)	69,12	3,52	3,66	Membangun ZI secara maksimal melalui pemenuhan enam area perubahan terutama dalam penegakan integritas dan inovasi pelayanan.
					Melakukan identifikasi risiko integritas dengan memperhatikan potensi terjadinya penyimpangan serta meningkatkan keterlibatan pimpinan dalam monitoring pelaksanaan sistem pengawasan.
					Melakukan monitoring atas penerapan inovasi atau perubahan yang telah dibangun sebagai dasar perbaikan berkelanjutan.
27	Universitas Mulawarman (Fakultas Teknik)	71,21	3,76	3,78	Mendorong agen perubahan agar terus berinovasi dan membawa dampak terhadap peningkatan kinerja dan pemberian layanan.
					Meningkatkan keterlibatan pimpinan secara aktif dalam melakukan monitoring dan evaluasi pembangunan ZI.
					Mengembangkan inovasi dalam bentuk digital yang terintegrasi dan dirasakan manfaatnya oleh <i>stakeholders</i> .
28	Universitas Riau (Fakultas Keperawatan)	73,50	3,66	3,84	Melakukan evaluasi atas pembangunan ZI secara berkala.
					Meningkatkan keterlibatan pegawai dalam peningkatan integritas dan tata kelola internal.
					Melakukan penguatan manajemen risiko dan integritas pegawai agar terbangun sistem pengawasan internal yang efektif.

29	Universitas Sumatera Utara (Fakultas Keperawatan)	73,40	3,85	3,89	Memperbaiki strategi komunikasi melalui pengelolaan media untuk meningkatkan kedekatan organisasi dengan masyarakat.
					Melakukan penguatan manajemen risiko dan integritas pegawai agar terbangun sistem pengawasan internal yang efektif.
					Membangun inovasi pelayanan berdasarkan permasalahan yang ada sehingga sesuai dengan kebutuhan <i>stakeholders</i> (mahasiswa).
30	Universitas Tanjungpura (Fakultas Ekonomi dan Bisnis)	73,47	3,81	3,92	Mengembangkan inovasi tata kelola internal dan pelayanan guna memberikan pelayanan yang berkualitas.
					Menyempurnakan ukuran kinerja agar lebih berorientasi hasil, dapat diukur, dan relevan dengan kondisi yang ingin diwujudkan.
					Penguatan integritas aparatur dengan memetakan potensi penyimpangan yang mungkin terjadi dan memitigasinya.

E. Tidak memenuhi batas minimal survei eksternal

NO	UNIT KERJA	USULAN PREDIKAT	IPP	IPAK	REKOMENDASI
1	LPMP Jawa Timur	WBBM	3,54	3,68	Membangun komunikasi dan kedekatan yang lebih intensif dengan pengguna layanan (<i>stakeholders</i>) sehingga mengurangi <i>gap</i> antara harapan pengguna layanan dengan layanan yang diberikan.
					Mengoptimalkan pemanfaatan media sebagai upaya mempercepat penyebaran informasi perubahan pelayanan sehingga tercipta persepsi positif dari pengguna layanan.
2	Universitas Gadjah Mada (Fakultas Filsafat)	WBK	3,20	3,53	Memanfaatkan hasil survei pelayanan sebagai <i>feedback</i> bagi perbaikan pelayanan agar sesuai kebutuhan dan keinginan <i>stakeholders</i> .

F. Tidak memenuhi kriteria jumlah minimal responden survei eksternal

NO	UNIT KERJA	USULAN PREDIKAT	CATATAN/REKOMENDASI
1	Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur	WBK	<p>1. Hasil pelaksanaan survei eksternal belum memenuhi kriteria jumlah minimal responden sehingga data yang diperoleh tidak memenuhi syarat untuk dapat divalidasi oleh Badan Pusat Statistik.</p> <p>2. Meningkatkan pembangunan ZI pada enam area perubahan secara berkelanjutan untuk meningkatkan integritas dan pelayanan kepada <i>stakeholders</i>.</p> <p>3. Meningkatkan komunikasi dan kedekatan (<i>intimacy</i>) kepada <i>stakeholders</i> terkait perbaikan yang telah dilakukan sehingga tercipta persepsi positif terkait integritas dan pelayanan prima.</p>
2	Balai Bahasa Jawa Barat	WBK	
3	Universitas Padjadjaran (Fakultas Ekonomi dan Bisnis)	WBK	
4	LPMP Sulawesi Selatan	WBK	
5	Balai Pelestarian Nilai Budaya Maluku	WBK	
6	Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah	WBK	
7	Universitas Sam Ratulangi (Fakultas Teknik)	WBK	
8	Politeknik Negeri Padang	WBK	

G. Tidak memenuhi seleksi administrasi awal

NO	UNIT KERJA	REKOMENDASI
1	Balai Konservasi Borobudur	<p>1. Memastikan setiap unit kerja yang diajukan telah memenuhi seluruh ketentuan sesuai dengan PermenPANRB Nomor 10 Tahun 2019.</p> <p>2. Tim Penilai Internal agar lebih intensif dalam membimbing pembangunan ZI, meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan ZI.</p>
2	LPMP Papua	
3	LPMP Kalimantan Barat	
4	Balai Pelestarian Cagar Budaya Bali	